



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DAN
UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI
TENTANG
PENDIDIKAN PEMILIH

NOMOR : 07/HK.05-PKS/5203/2026
NOMOR : 001/PKS/A/UGR/2026

Pada hari Selasa tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 6 Kelurahan Majidi Kecamatan Selong yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Rektor Universitas Gunung Rinjani dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gunung Rinjani, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Pendidikan Pemilih yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yakni tersedianya landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama dibidang pendidikan pemilih di lingkungan Kampus;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yakni terselenggaranya sosialisasi, pendidikan pemilih, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan, penempatan magang oleh PIHAK KEDUA di lingkungan PIHAK KESATU, dan Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi program kerja pendidikan pemilih dalam kerangka kerja sama PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang terdiri atas kegiatan :
 - a. Penyusunan Regulasi :
 - 1) Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) atau istilah lain;
 - 2) Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Anggota Senat Mahasiswa baik tingkat Universitas dan Fakultas; serta
 - 3) Panitia Penyelesaian Sengketa Pemilihan atau istilah lain;
 - b. Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Mahasiswa (KPUM) atau istilah lain;
 - c. Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa serta Anggota Senat Mahasiswa baik tingkat Universitas dan Fakultas;
 - d. Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih termasuk tidak terbatas pelaksanaan magang mahasiswa pada KPU Kabupaten Lombok Timur;
 - e. Evaluasi Kerja Sama.
 - f. Rincian lebih detail sebagaimana tertuang dalam lampiran Perjanjian Kerjasama Ini.
- (2) Ketentuan mengenai kriteria mahasiswa dalam pelaksanaan magang pada PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (3) Rincian Program Kerja Pendidikan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pelaksanaan Kerja Sama sesuai ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) dilakukan dengan memerhatikan kemampuan dukungan pembiayaan dan sumberdaya, peraturan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan lembaga PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. mengambil inisiatif dan/atau mendorong dilaksanakannya aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. meminta dan mendapatkan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini dari PIHAK KEDUA;
 - c. menyampaikan saran dan masukan kepada PIHAK KEDUA terkait pelaksanaan kerja sama ini;

- d. menolak usul/saran/masukan dari PIHAK KEDUA dalam hal usul/saran/masukan dimaksud di luar kemampuan dan/atau tidak sesuai dengan kondisi dan regulasi yang berlaku di lingkungan PIHAK KESATU;
- e. mendapat laporan hasil pelaksanaan aktivitas/kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KEDUA;
- f. mengusulkan pemutusan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KEDUA berdasarkan alasan-alasan yang relevan, serta tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini yang diminta oleh PIHAK KEDUA sepanjang data dan informasi dimaksud berada dalam penguasaan PIHAK KESATU;
- b. Menerima usul pemutusan Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KEDUA jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.
- c. Merancang dan menetapkan konsep pelaksanaan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, secara sederhana/non budgeting atau sekurang-kurangnya berbiaya ringan serta sesuai kemampuan PIHAK KESATU;
- d. Menata usahakan dan/atau mendokumentasikan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
- e. Memastikan seluruh aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, terlaksana sesuai kesepakatan mengacu pada program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- g. Bersama PIHAK KEDUA menyusun laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

(3) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mengambil inisiatif dan/atau mendorong dilaksanakannya aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. meminta dan mendapatkan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini dari PIHAK KESATU;
- c. menyampaikan saran dan masukan kepada PIHAK KESATU terkait pelaksanaan kerja sama ini;
- d. menolak usul/saran/masukan dari PIHAK KESATU dalam hal usul/saran/masukan dimaksud di luar kemampuan dan/atau tidak

sesuai dengan kondisi dan regulasi yang berlaku di lingkungan PIHAK KEDUA;

- e. mendapat laporan hasil pelaksanaan aktivitas/kegiatan berdasarkan perjanjian kerja sama ini dari PIHAK KESATU;
- f. mengusulkan pemutusan Perjanjian Kerja Sama kepada PIHAK KESATU jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Menyediakan dan memberikan informasi dan data yang terkait ruang lingkup kerja sama ini yang diminta oleh PIHAK KESATU sepanjang data dan informasi dimaksud berada dalam penguasaan PIHAK KEDUA;
- b. Menerima usul pemutusan Perjanjian Kerja Sama dari PIHAK KESATU jika berdasarkan hasil evaluasi diperoleh alasan-alasan yang relevan untuk dilakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak serta asas konsensualisme.
- c. Merancang dan menetapkan konsep pelaksanaan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, secara sederhana/*non budgeting* atau sekurang-kurangnya berbiaya ringan serta sesuai kemampuan PIHAK KEDUA;
- d. Menata usahakan dan/atau mendokumentasikan aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku pada PIHAK KEDUA;
- e. Memastikan seluruh aktivitas berkenaan dengan kegiatan dan program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, terlaksana sesuai kesepakatan mengacu pada program kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini;
- f. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- g. Bersama PIHAK KESATU menyusun laporan dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

ANGGARAN

PARA PIHAK sepakat melakukan *sharing* anggaran untuk membiayai kegiatan/aktifitas dalam lingkup kerja sama ini sebagaimana tercantum dalam lampiran dengan memperhatikan kemampuan anggaran PARA PIHAK.

Pasal 5

KEADAAN KAHAR

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK.

- (2) Keadaan kahar yang dimaksud meliputi gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, namun tidak terbatas pada peristiwa atau keadaan lain sejenis yang berada di luar kendali PARA PIHAK yang mengakibatkan PARA PIHAK tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar.

Pasal 6

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :

1. telah mencapai akhir jangka waktu kerja sama yakni tanggal 30 Juni 2027;
2. terjadi perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan/dilanjutkan;
3. terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Perjanjian Kerja Sama ini, sepanjang tidak dilakukan kesepakatan lain oleh PARA PIHAK selain Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya.

Pasal 9

KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan para Pihak atas *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;

- c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA

Pasal 10

PENUTUP



Perjanjian Kerja Sama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
a.n. Rektor Universitas Gunung Rinjani
Wakil Rektor Bidang Akademik



Dr. Muh. Saleh, S.IP.,MH

PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur,



Ada Suci Makbullah, S.H

RANCANGAN

PROGRAM KERJA PENDIDIKAN PEMILIH DALAM KERANGKA KERJA SAMA KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR DENGAN UNIVERSITAS GUNUNG RINJANI

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN	OUTPUT/OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	KETERANGAN
1	Penyusunan Regulasi Pembentukan KPUM, Penyelenggaraan Pemilihan Presma dan Anggota DPM, serta Pembentukan Peradilan Pemilihan	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Peraturan Rektor UGR mengenai : 1. Pembentukan KPUM; 2. Penyelenggaraan Pemilihan Presma dan Anggota DPM; dan 3. Pembentukan Peradilan Pemilihan	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
2	Pembentukan KPUM					
	2.1 Pembentukan Tim Seleksi	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Keputusan Rektor UGR tentang Pembentukan Tim Seleksi KPUM	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
	2.2 Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi Administrasi, dan Seleksi Calon Anggota KPUM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Dokumen hasil seleksi calon anggota KPUM	Tim Seleksi Calon Anggota KPUM	PIHAK KESATU	
	2.3 Penetapan KPUM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Keputusan Rektor UGR tentang Penetapan Anggota KPUM periode ... - ...	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
	2.4 Penetapan Sekretariat KPUM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Keputusan Ketua KPUM tentang Pembentukan Sekretariat KPUM	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	
3	Pelaksanaan Pemilihan Presma dan Anggota DPM					
	3.1 Penyusunan Rencana dan Anggaran Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Dokumen Rencana dan Anggaran Pemilihan Presma dan Anggota DPM	KPUM	PIHAK KESATU, dan PIHAK KEDUA	
	3.2 Pembentukan Petugas/Tim Ad hoc Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Keputusan KPUM tentang Pembentukan Petugas/Tim Ad hoc Pemilihan Presma dan Anggota DPM	KPUM	PIHAK KESATU	
	3.3 Pembentukan Pengawas Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Keputusan Ketua KPUM Tentang Penetapan Pengawas Pemilihan Presma dan Anggota DPM	KPUM, Rektor UGR	PIHAK KESATU	
	3.4 Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Keputusan KPUM tentang Pemantau Pemilihan Presma dan Anggota DPM, dan dan Sertifikat Akreditasi	KPUM	PIHAK KESATU	
	3.5 Pemutakhiran Data Pemilih	Menyesuaikan dan	Keputusan KPUM tentang Penetapan	Petugas/Tim ad hoc	PIHAK KESATU	

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN	OUTPUT/OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	KETERANGAN
	dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Presma dan Anggota DPM	disepakati oleh para pihak	Daftar Pemilih Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Pemilihan, KPUM		
3.6	Sosialisasi Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Pemilihan Presma dan Anggota DPM diketahui oleh masyarakat kampus	KPUM	PIHAK KESATU	
3.7	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Keputusan KPUM tentang Penetapan Peserta Pemilihan Presma dan Anggota DPM	KPUM	PIHAK KESATU	
3.8	Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Pemilihan dan/atau Sengketa Proses Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Putusan penyelesaian dugaan pelanggaran Pemilihan dan/atau Sengketa Proses Pemilihan	Pengadilan Pemilihan	Pengawas Pemilihan, Pemantau Pemilihan, KPUM/Petugas/Tim ad hoc, dan/atau Peserta Pemilihan	
3.9	Fasilitasi Kampanye Peserta Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Media Kampanye untuk pelaksanaan Kampanye dalam bentuk Orasi dan Dialog Calon, serta bentuk Debat Antar Calon	KPUM, Peserta Pemilihan	PIHAK KESATU	
3.10	Penyiapan, Pengelolaan, dan Distribusi Logistik Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Logistik Pemilihan Presma dan Anggota DPM terkelola, terdistribusi, dan siap digunakan sebagaimana mestinya	Sekretariat KPUM, KPUM, Petugas/Tim Adhoc	PIHAK KESATU	
3.11	Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	BA dan Sertifikat Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Petugas/Tim Ad hoc, Saksi Peserta Pemilihan BEM dan DPM, Pengawas Pemilihan	PIHAK KESATU, Pemantau Pemilihan	
3.12	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, Penetapan Hasil Pemilihan Presma dan Anggota DPM, dan Penetapan Calon Presma dan Anggota DPM terpilih.	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	1. Keputusan KPUM tentang Hasil Pemilihan Presma dan Anggota DPM; 2. Keputusan KPUM tentang Penetapan Calon Presma dan Anggota DPM Terpilih	KPUM, Petugas/Tim ad hoc, Saksi Peserta Pemilihan Presma dan Anggota DPM, Pengawas Pemilihan	PIHAK KESATU, Pemantau Pemilihan	
3.13	Penyelesaian Perselisihan Atas Hasil Pemilihan Presma dan Anggota DPM	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Bersifat opsional	Peserta Pemilihan, Pengadilan Pemilihan, KPUM, Pihak Terkait	Pengawas Pemilihan, Pemantau Pemilihan	
3.14	Penyampaian Hasil	Menyesuaikan dan	Keputusan Rektor UGR tentang	Rektor UGR, Wakil	PIHAK KESATU	

NO	KEGIATAN / AKTIVITAS	JADWAL PELAKSANAAN	OUTPUT/OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB	PIHAK YANG TERLIBAT	KETERANGAN
	Pemilihan Presma dan Anggota DPM dari KPUM kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	disepakati oleh para pihak	Penetapan Anggota KPUM UGR Periode ... - ...	Ketua Rektor Bidang Kemahasiswaan, KPUM		
4	Penyelenggaraan Pendidikan Pemilih					
	4.1 Rapat Kerja :					
	4.1.1 Penyusunan Struktur dan Metode Pendidikan Pemilih di Lingkungan Kampus	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Penetapan mengenai Struktur dan Metode Pendidikan Pemilih di Lingkungan Kampus	PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA	KPUM	
	4.1.2 Penyusunan Kerangka kerja Pendidikan Pemilih Tahun Ajaran 2026/2027 melalui Magang dan/atau Pendidikan Pemilih Kolaboratif	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Dokumen Rencana Pendidikan Pemilih Tahun Ajaran 2026/2027 melalui Magang dan/atau Pendidikan Pemilih Kolaboratif	PIHAK KEDUA, KPUM	PIHAK KESATU	
	4.2 Pendidikan Pemilih di lingkungan Kampus	Menyesuaikan dan disepakati oleh para pihak	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Kampus	KPUM	PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU	
	4.3 Magang Mahasiswa	Februari-Juli Tahun berikutnya	Daftar Nama Mahasiswa Yang memenuhi Kriteria Magang di KPU Kabupaten Lombok Timur	PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan Mahasiswa Magang	KPUM, Pemangku kepentingan Lainnya	
5	Evaluasi Kerja Sama	Januari 2027 dan Akhir Bulan Juli 2027	Laporan Tentative dan Laporan Akhir Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama	PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA	PEMANGKU KEPENTINGAN LAINNYA	

PIHAK KEDUA
a.n. Rektor Universitas Gunung Rinjani
Wakil Rektor Bidang Akademik

Dr. Muh. Saleh, S.IP.,MH



PIHAK KESATU
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur,

Ada Suci Makbullah, S.H

